

**ANALISA PEMIKIRAN IMAM MALIK BIN ANAS
TENTANG HAK IJBAR WALI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (SHI)*



Oleh:

GUSHAIRI

NIM. 10721000037

**PROGRAM SI
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2011

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Analisa Pemikiran Imam Malik bin Anas Tentang Hak Ijbar Wali*”. Ini ditulis berdasarkan latar belakang pemikiran ulama, bahwa para ulama sama-sama mengakui adanya hak *ijbar* wali. Namun, mereka berbeda pendapat terhadap wali mana saja yang mempunyai hak untuk menikahkan tanpa izin di bawah perwaliannya, dan siapa saja yang berhak dinikahkan tanpa dimintai izinnya terlebih dahulu. Dengan demikian dalam skripsi ini penulis menelusuri dan menganalisa bagaimana konsep *ijbar* wali dan metode istinbath hukum Imam Malik bin Anas dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali.

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis maksudkan adalah untuk mengetahui konsep hak *ijbar* wali dan metode istinbath hukum Imam Malik bin Anas dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kitab *Al-Muwaththa'*, dan *Al-Muntaqa' fi Syarhil Muwaththa'* sebagai rujukan primernya. Sedangkan bahan sekunder dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada dalam kaitannya dengan penelitian ini seperti *fiqh Islam wa adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh 'Ala Mazhabi al-Arba'ah* Karya Imam Al-Jaziri, *Subulussalam*, *Fathul Baari*, serta literatur lainnya. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif, komperatif dan analisis konten.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, Imam Malik memandang wali yang berhak untuk menikahkan tanpa izin anak perempuan adalah Ayah, orang yang menerima wasiat dari ayah, dan pemilik budak. Imam Malik berpendapat hak *ijbar* tersebut diperoleh karena dua sebab, yaitu karena bikir dan kecil. Jadi, yang boleh dinikahkan tersebut tanpa izin adalah, gadis yang kecil dan dewasa yang belum dipandang cerdas, kemudian janda yang kecil. Sedangkan metode istinbath yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan adanya hak *ijbar wali* tersebut adalah berdasarkan *Ijma' ahl Madinah*.

Dengan memperhatikan konsep dan metode yang digunakan Imam Malik di atas, *Ijma' ahl-Madinah* yang digunakan Imam Malik dalam memahami hak *ijbar wali* dan cara memahami hadits dengan *mafhum mukhalafah* bisa dijadikan hujjah, karena di samping amalan perbuatan Madinah yang langsung hidup bersama Rasulullah Saw yang berkelanjutan sampai masa Imam Malik, *mafhum mukhalafah* bisa dijadikan hujjah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : BIOGRAFI IMAM MALIK	13
A. Riwayat Hidup Imam Malik	13
B. Guru-Guru dan Murid-murid Imam Malik	17
C. Metode Istimbath Imam Malik	21
D. Karya-Karya Imam Malik.....	30
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG	
WALI DALAM PERNIKAHAN	33
A. Pengertian Wali.....	33
B. Dasar Hukum Perwalian	36
C. Kedudukan Wali dalam Perkawinan	39
D. Macam-Macam Wali.....	43
E. Syarat-Syarat Wali.....	47

BAB IV : ANALISA PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HAK IJBAR WALI.....	52
A. Konsep Hak <i>Ijbar</i> Wali menurut Imam Malik bin Anas.....	52
B. Metode Istimbath Hukum Imam Malik Dalam Menetapkan Adanya hak <i>Ijbar</i> Wali	65
C. Analisa	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Manusia sejak awal kehidupannya atau sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk alam manusia.

Kehadiran agama Islam oleh Allah salah satunya adalah untuk memelihara keturunan melalui perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat agar mencapai rumah tangga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* yang penuh barakah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu :

آيَاتِهِ إِلَيْهَا بَيْنَكُمْ
لَا يَاتِ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berpikir”¹.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan pasangan agar saling sayang-menyayangi sehingga menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat.

Namun seringkali sebagian masyarakat memahami ajaran agama dari arah fiqh yang bertumpu kepada mazhab, fiqh adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci². Bukan berarti dengan mengamalkan pemikiran madzhab adalah kesalahan besar, namun jika mengamalkannya tanpa memandang prinsip-prinsip humanitas universal, maka pemahaman seperti itu menjadi pemahaman yang sempit dan pada akhirnya tidak sesuai dengan prinsip hukum :

الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

Artinya : ”Syari’at Islam selalu sesuai untuk diterapkan di setiap masa dan tempat”³.

Dalam Hukum Islam (Fiqh), terutama di kalangan empat mazhab masih mengakui adanya hak *ijbar*. Maksud hak *ijbar* di sini adalah hak seseorang (ayah

¹Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an Karim*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1993), h.596

²Abdul Wahab al-Khallaf, *‘ilm Usul al-Fiqh*, (Jakarta : Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), h. 1

³Lebih jauh lihat uraian Yusuf Qardawi dalam karyanya yang diberi judul sesuai dengan kaidah tersebut, *al-Syari’at al-Islamiyah Salihatun li al-Tatbiq Fi Kulli Zaman wa Makan*, (Kairo : Dar al-Sahwah, 1393 H) , Lihat juga T. M Hasbi Ash Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-5, h. 337

ke atas) untuk menikahkan anak-anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu⁴.

Orang yang mempunyai hak *ijbar* wali ini disebut dengan wali *mujbir*, jika dilihat keberadaan wali *mujbir* ini, ia termasuk bagian dari wali nasab, yang mana wali nasab ini adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut, ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat dan agak jauh)⁵. Jika telusuri lagi wali nasab ini adalah termasuk macam-macam wali dalam perkawinan, yang tanpa wali ini perkawinan tidak sah.

Berbicara masalah wali *mujbir*, Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya tanpa ada persetujuan darinya, ia menjelaskan bahwa gadis perawan belum berhak terhadap hartanya sehingga ia kawin dan diketahui kecerdasannya⁶.

Hasan dan Ibrahim an-Nakha'i berpendapat bahwa diperbolehkan bagi orang tua menikahkan puterinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak menyukainya⁷.

⁴H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 101

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 85

⁶Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut : Darul Fikri, 1989), h. 331

⁷Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 381

Menurut Mahmud Yunus wali *mujbir* artinya, wali yang boleh memaksakan perkawinan kepada anaknya sehingga ia boleh mengawinkan anak perempuannya dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya⁸.

Menurut Imam Syafi'i, Lais bin Sa'ad, ibn Abi Laila, Ishaq bin Rahawaih, Imam Ahmad, dan Imamiyah berpendapat bahwa ayah sah menikahkan anak gadisnya yang dewasa dan cerdas walaupun tanpa persetujuannya⁹.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa gadis yang belum baligh dapat dikawinkan oleh setiap orang yang mempunyai kekuasaan atasnya, baik ayah, keluarga, atau lainnya. Dan baginya ada hak *khiyar* (memilih) manakala telah mencapai usia dewasa¹⁰.

Kasus nikah paksa ala Siti Nurbaya yang melegenda di masyarakat Indonesia bukti nyata dari pandangan hak *ijbar* wali sebagai ketentuan fiqh yang memberikan hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya (tanpa persetujuan anak). Hal ini dikarenakan orang tua dalam budaya kita memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya, mulai dari hal-hal yang sepele seperti memilih pakaian, sekolah dan bahkan sampai urusan jodoh sekalipun tidak lepas dari intervensi orang tua. Sepintas kecenderungan ini sebuah pelajaran, sebab orang tualah yang mengikuti perjalanan kehidupan anak.

⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1981), h. 64

⁹Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), h. 204-205

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h. 405

Sehingga tidak heran kalau kasih sayang orang tua kepada anak tidak terbatas. Al-Qur'an menginformasikan hal ini dengan firman-Nya :

رُئِيَ الشَّهَوَاتِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الدَّهَبِ وَالْخَيْلَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

Artinya : "Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda yang bagus, binatang-binatang ternak dan tanam-tanaman. Demikian itulah kesukaan hidup didunia, dan disisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya". (Q. S. :3 : 14)¹¹

Dengan alasan kasih sayang orang tua kepada anak, membawa kesimpulan bahwa apapun pilihan orang tua adalah terbaik buat sang anak, seringkali tidak terlintas di benak mereka apakah pilihan yang ditentukannya adalah yang terbaik buat anak.

Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa meminta izin dan persetujuan seorang perempuan dalam perkawinannya itu disebabkan atas perizinan terhadap gadis dan janda, sebab janda lebih tahu atas dirinya dan berpengalaman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, izin seorang perawan (gadis) hanya dengan diamnya karena anak gadis merasa malu untuk berterus terang, sedangkan persetujuan terhadap seorang janda dengan perkataan yang jelas darinya, jika seorang gadis diam atau tersenyum dan tidak berteriak atau menangis sedih maka itu tanda persetujuan darinya untuk melangsungkan perkawinan¹².

Dalam hal ini berkaitan langsung dengan perasaan seorang gadis yang akan mendampingi suaminya seumur hidup, dialah yang akan menjalani dan akan

¹¹Mahmud Yunus, *op. cit*, h. 69

¹²Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, th), Juz VII, h. 212-213

merasakan kebahagiaan serta ketentraman dalam rumah tangganya, maka meminta persetujuan seorang gadis dan janda dalam perkawinan sangatlah dianjurkan, sebab seorang perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya, seperti dalam hadits Nabi Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الايم حتي : يا رسول الله كيف اذننها؟ قال ان تسكت

Artinya : “Tidak boleh dinikahkan para janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai izinnya, mereka bertanya, ya Rasulullah bagaimana dengan izinnya? Rasulullah menjawab diamnya”¹³.

عن خنساء بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه

Artinya : “Dari Khansa binti Khidam sesungguhnya bapaknya telah mengawinkannya, sedang Khansa’ adalah seorang janda, maka ia datang menghadap Rasulullah Saw maka Rasulullah menolak (membatalkan) nikahnya”¹⁴.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخبرها النبي صلى الله عليه

¹³ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Baari Bisyarh Shahih Bukhari*, (Beirut: Daarul Fikr, 2000), juz 10, h. 240

¹⁴ *Ibid*

Artinya : “Bahwasannya seorang gadis datang menghadap Rasulullah Saw. Ia menceritakan bahwasannya ayahnya telah mengawinkannya dengan paksa sedang ia tidak menyukainya, maka Rasulullah menyuruh untuk memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan)”¹⁵.

Dalam hadits Abu Hurairah tersebut, terdapat pengertian yang berupa larangan Rasul untuk menikahkan gadis tanpa izinnya, sebagaimana beliau melarang menikahkan janda tanpa perintahnya.

Hadits dari Ibnu Abbas ini jelas menunjukkan bahwa Rasul menerima pengaduan seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuannya. Pemberian hak *khiyar* (memilih untuk meneruskan pernikahan atau bercerai) Rasul terhadap pernikahan yang dilakukan oleh ayah si gadis adalah tegas dikarenakan tidak adanya persetujuan dari gadis tersebut. Dengan kata lain, gadis itu tidak suka kepada laki-laki pilihan ayahnya. Hadits ini menunjukkan bahwa ayah tidak boleh menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan (izin)nya.

Berangkat dari beberapa hadits di atas, terlihat bahwa Imam Malik yang disebut sebagai ahli hadits, tidak menggunakan hadits-hadits yang melarang wali menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya.

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pola pikir Imam Malik dalam menetapkan bolehnya wali *mujbir* menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul, **”ANALISA PEMIKIRAN IMAM MALIK BIN ANAS TENTANG HAK IJBAR WALI”**.

¹⁵ Sulaiman Abi Dawud, *Sunah Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Juz I, h. 232

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Adanya perbedaan pendapat para fuqaha masalah wali *mujbir* terhadap anak perempuan dan metode yang digunakannya.
2. Dampak terhadap anak perempuan dengan adanya hak *ijbar* wali.

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dengan meneliti :

1. Konsep hak *ijbar* wali menurut Imam Malik bin Anas.
2. Metode Istinbath hukum Imam Malik bin Anas dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang di atas dan dari batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hak *ijbar* wali menurut Imam Malik Bin Anas?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Malik bin Anas dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep hak *ijbar* wali menurut Imam Malik Bin Anas.

- b. Untuk mengetahui secara mendalam tentang metode istinbath hukum Imam Malik Bin Anas dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk syarat menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
- b. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perwalian.
- c. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan tentang metode Imam Malik bin Anas dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah *library research* yang bersifat kualitatif di mana datanya diperoleh dari buku-buku yang memuat pendapat Imam Malik dalam hal *ijbar* wali yang kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai pemikiran Imam Malik bin Anas tentang hak *ijbar* wali.

2. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka digunakan data sekunder yang di bedakan dalam :

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yakni kitab *Al-Muwatha'* karangan Imam Malik, *Al-Muntaqa' Syarh Muwatha'* karangan Al-Qadi Abi Walid Sulaiman,
- b. Bahan Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh seperti, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Kitabul Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, buku-buku, ensiklopedi, kamus-kamus dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai pada tujuan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami konsep dan metode istinbath hukum Imam Malik bin Anas dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali.

b. Metode Komperatif

Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang-orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.

Metode ini akan penulis bandingkan pendapat Imam Malik bin Anas dengan Imam-Imam lainnya dalam hal hak *ijbar* wali ini.

c. Metode Analisis konten

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan yakni metode analisis konten.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skirpisi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi biografi Imam malik, Riwayat hidup Imam Malik, Guru-guru dan Murid-murid Imam Malik, Metode istinbath hukum Imam Malik, dan Karya-Karya Imam Malik.

BAB III : Bab ini berisi teori dan pendapat-pendapat ulama dan ilmuwan muslim dan memaparkan secara teoritis tentang pengertian dan dasar hukum

perwalian, kedudukan wali dalam perkawinan, macam-macam wali, dan syarat-syarat wali.

BAB IV : Bab ini berisi tentang Konsep hak *ijbar* wali menurut Imam Malik, metode istinbath hukum Imam Malik dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali, dan analisa terhadap pemikiran Imam Malik tentang hak *ijbar* wali.

BAB V : Penutup dan saran dalam Penulisan skripsi ini.

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK

A. Riwayat Hidup Imam Malik

Ada sebuah kota yang namanya Darul Hijrah, Darul Hijrah itu adalah negeri tempat hijrah, yaitu negeri tempat hijrahnya Nabi Muhammad Saw dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian dinamakan Al-Madinah An-Nabawiyah atau dikenal dengan kota Al-Madinah. Kota ini terkenal sebagai kota termulia kedua di dunia setelah Al-Makkatul Mukarramah. Kota inilah yang menjadi pusat ahli hadits dan di sinilah lahir Imam Malik bin Anas¹.

Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn ‘Umar bin Al-Haris (93H-179 H)². Datuk yang kedua Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar. Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarnya ialah Abu Anas. Diceritakan dari Umar, Talhah, Aisyah, Abu Hurairah dan Hasan bin Thabir semoga Allah melimpahkan keridhaan-Nya atas mereka semua, datuk Imam Malik adalah seorang dari empat yang ikut menghantarkan dan mengebumikan Ustman bin Affan, datuknya termasuk salah seorang penulis ayat suci Al-Qur’an semasa Khalifah Usman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci Al-Qur’an. Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah,

¹M. T. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 141

²Malik Bin Anas, *Muwaththa’*, (Beirut : Darul Fikr, 1989), h. 5

apa yang diketahui beliau tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir di sebelah utara Al-Madinah. Bapak Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah untuk sumber nafkah keluarganya³.

Imam Malik lahir di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di Al-Akik buat sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap di Madinah⁴.

Jika dilihat silsilah keturunan Imam Malik di atas, mereka adalah termasuk orang yang ‘alim dan juga banyak menghafal hadits-hadits Nabi Saw.

Dalam satu riwayat bahwa beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 (tiga) tahun dan dilahirkan di kalangan rumah tangga yang ahli dalam bidang ilmu hadits dan hidup dalam masyarakat yang berkecimpung dengan hadits Nabi Saw dan *atsar*⁵. Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota itu. Oleh sebab itu, Imam Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan berikut berbagai problematikanya⁶.

³Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h. 72-73

⁴*Ibid.*

⁵Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h. 224

⁶Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terjemahan, Husain Muhammad, (Jakarta : P3M, 1986), Cet-I, h. 20

Tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup pada dua zaman. Kelahirannya bertepatan dengan eksisnya kekuasaan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan al-Walid Abd. Al-Malik dan meninggal pada masa Bani Abbasiyah tepatnya pada masa kekuasaan Harun al-Rasyid. Imam Malik hidup pada masa kekuasaan Bani Umayyah selama 40 tahun dan di masa Bani Abbasiyah selama 46 tahun⁷.

Imam Malik dikenal sebagai seorang mujtahid yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya meskipun harus berseberangan paham dengan kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh khalifah al-Manshur dari Bani Abbasiyah di Baghdad⁸.

Tidak ada sejarah hidup anak manusia yang mulus tanpa aral melintang serta asam garam dan pahit getirnya perjalanan hidup di dunia ini. Lebih-lebih lagi perjalanan hidup orang-orang besar, seperti para Nabi dan para Rasul, juga para Sahabat beliau dan kemudian para Ulama' *auliya'ullah* (kekasih Allah). Demikian pula kehidupan yang dijalani Imam Malik bin Anas.

Sepanjang riwayat, ketika Imam Malik berusia 54 tahun di kala itu pemerintahan Islam di tangan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang beribukota di Baghdad dan selaku gubernur di Madinah sebagai wakil kepala negara yakni Ja'far bin Sulaiman Al-Husyimy⁹.

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu*, (Mesir : Dar al-fikr al-'Arabi, 1952), Cet. ke-2, h. 24

⁸Huzaiman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 105

⁹Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 109

Di antara sebagian pendapat ahli sejarah yang tertera ialah beliau di azab karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa tidak sah talak orang yang dipaksa, hal ini berlandaskan dari sabda Rasulullah Saw :

عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : الله عليه وسلم ان الله

تجاوز عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya : "Dari Abu Zar al-Ghifari ra. berkata : berkata Rasulullah Saw Sesungguhnya Allah melewatkan hukuman terhadap hambanya itu bersalah, lupa dan karena sesuatu yang dipaksakan kepadanya"¹⁰.

Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang menjatuhkan talak karena dipaksa maka tidak jatuh talaknya, dengan demikian Khalifah Ja'far bin Sulaiman al-Husyimy tidak suka mendengar hadits tersebut disebabkan karena hadits ini dijadikan sebagai hujjah bagi musuh beliau, karena dengan hadits tersebut pihak musuh akan menolak perjanjian (bai'ah) pelantikan Ja'far lantaran mereka dipaksa.

Ja'far bin Sulaiman al-Husyimy pernah melarang Imam Malik supaya tidak menggunakan hadits yang tersebut di atas. Imam Malik tidak mau menuruti perintah oleh karena itu beliau disiksa¹¹. Beliau juga pernah menyuruh beberapa orang utusan untuk menanyakan pendapat Imam Malik tentang permasalahan tersebut. Imam Malik memberikan pendapatnya dengan berterus terang dan hal ini

¹⁰Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan ibnu Majah*, (Beirut : Darul Fikr, 1995), h. 642

¹¹Ahmad al-Syurbasi, *op,cit*, h. 96

disaksikan oleh beberapa orang yang diutus oleh Ja'far lantaran itu beliau memerintahkan supaya menangkap, dan memukulnya sebanyak tujuh puluh rotan sehingga beliau terjatuh.

Setelah berita penyiksaan terhadap Imam Malik diketahui oleh penduduk Madinah maka banyak di antara mereka yang keluar berontak sebagai bantahan terhadap perbuatan yang kejam itu. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berduka cita atas penyiksaan terhadap Imam Malik. Beliau merasa ragu dengan apa yang telah baru terjadi karena beliau sangat menghormati Imam Malik¹².

Imam Malik mangkat pada hari *Ahad*, tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H (menurut sebagian pendapat, tahun 169 H) di Madinah¹³, beliau meninggalkan empat orang anak yang shalih-shalihah yakni Yahya, Muhammad, Hammad dan Ummul Baha'.

B. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Malik

1. Guru-Guru Imam Malik

Kegiatan pendidikan Imam Malik adalah di kota Madinah, kota ini merupakan tempat berdomisilinya para sahabat besar, baik dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Materi pelajaran yang mula-mula dipelajari adalah al-Qur'an, hadits dan fiqh. Kecerdasannya telah menghantarkan Imam Malik kecil menguasai materi pelajaran dengan baik dan menjadi murid yang luas

¹²*Ibid.*

¹³ Malik bin Anas, *loc. cit*

wawasannya¹⁴. Di antara guru-gurunya adalah Abd. al-Rahman ibn Hurmuz Al-‘Araj, Imam Malik pernah berguru kepadanya selama lebih kurang tujuh tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain. Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan pada mereka yang hendak datang menemui Abdul Rahman bahwa dia sedang sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan syekh itu satu hari penuh¹⁵.

Di antara guru Imam Malik lainnya adalah Nafi’ ibn Abi Naim (belajar materi qira’ah), Rabi’ah Ibn Abd. Al-Rahman (belajar fiqh), Nafi’ Maula ibn Umar dan Ibn Syihab al-Zuhri (dari keduanya, Imam Malik belajar materi hadits)¹⁶.

Menginjak usia tujuh belas tahun, Malik sudah mendapat ijazah (izin dari seorang syekh) untuk menyelenggarakan pengajian sendiri di masjid Madinah. Imam Malik menanggapi pemberian ijazah ini dengan berkata ”saya tidak mengadakan pengajian sendiri kecuali sudah tujuh puluh syekh dan ulama

¹⁴Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, (Singapura-Jeddah : al-Haramian, th), h. 239

¹⁵Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 76

¹⁶Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Kairo : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), Juz. II. h. 206

memberikan kesaksian bahwa saya telah benar-benar pantas untuk melakukan itu”¹⁷.

Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu. Mula-mula Imam Malik menghafal sunnah, atsar, dan fatwa-fatwa sahabat. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada usia yang masih sangat muda, Imam Malik minta izin kepada ibunya untuk mengikuti pengajian para ulama. Saat itu ibunya yang bernama Alamiyah Binti Sarik al-Azdiyah memilihkan baju terbaru dan memasang surban dan ibunya berkata:”pergilah ke pengajian Rabi’ah ibn Abd. Al-Rahman dan tulislah apa yang kamu dapati darinya”. Riwayat ini menunjukkan bahwa sejak kecil Imam Malik gemar mencari ilmu. Bahkan sering pula terjadi sepulang pengajian, Imam melewati pepohonan rindang sambil menghafal yang ia dapati dari pengajian. Ketika saudaranya melaporkan kebiasaan Imam Malik kepada ayahnya, ayahnya berkata:”Biarkan ia menghafal hadits-hadits Nabi saw”¹⁸.

2. Murid-Murid Imam Malik

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak di negeri Madinah dan tahu kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta pendapat kepada para ulama untuk duduk di kursi fatwa. Imam Malik berkata,”Saya tidak duduk di kursi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh syaikh yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu”¹⁹.

¹⁷Husain Hamid Hasan, *Al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Darul Kitab Islam, 1981), h. 97

¹⁸Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 25

¹⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’*, Terjemahan, Nadirsyah Hawari, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 180

Beliau memiliki dua majelis taklim, *pertama* majelis hadits dan yang *kedua* majelis fatwa. Beliau membuat jadwal khusus untuk fatwa dan hadits, selain ada yang datang langsung kepada beliau dan sang Imam kemudian menuliskan jawabannya untuk siapapun yang mau²⁰.

Imam Malik tinggal di Madinah dan tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali hanya untuk menunaikan ibadah haji, walaupun sempat Khalifah Harun al-Rasyid mengajaknya tinggal di Baghdad namun beliau tidak mau.

Lamanya beliau tinggal di Madinah dan ketokohnya dalam bidang fiqh telah membuat ia terkenal dan menjadi tujuan-tujuan untuk menimba ilmu dari beliau. Kebanyakan imam-imam yang termasyhur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri, ada dari Syam, Irak, Afrika Utara, dan Andalusia²¹.

Di antara muridnya adalah Abdullah bin Wahab yang berguru kepadanya selama dua puluh tahun dan menyebarkan mazhab Maliki di Mesir dan Maroko. Imam Malik sangat menghormati dan mengagumi Abdullah bin Wahab dan sering menulis surat kepadanya ke Mesir dan menjulukinya sebagai faqih Mesir, wafat pada tahun 197 H²².

Muridnya yang lain adalah Abdurrahman bin Al-Qasim al-Mishriy, memiliki peranan penting dalam menulis mazhab Imam Malik, berguru kepada

²⁰*Ibid* .

²¹*Ibid*.

²²*Ibid*.

Imam Malik selama hampir dua puluh tahun, meriwayatkan kitab *Al-Muwaththa'* dan periwayatannya termasuk yang paling shahih dan wafat pada tahun 192 H.

Kemudian beliau juga punya murid yang bernama Asyhab bin Abdul 'Aziz al-Qaisi, rujukan kaum muslimin di Mesir dalam bidang fiqh dari Tunisia, Asyhab wafat pada tahun 224 H. Selain itu ada juga Abu Al-Hasan Al-Qurthubiy, belajar kitab *Al-Muwathatha'* secara langsung kepada Imam Malik dan menyebarkannya di Andalusia²³.

Jika diklasifikasikan murid-murid Imam Malik ini banyak sekali, di antaranya dari golongan tabi'in mereka adalah, Ayub Asy-sykah fiyani, Abul Aswad, Yahya bin Said al-Anshari, Musa bin 'Uqbah dan Hisyam bin 'Arwah. Dari golongan bukan tabi'in, mereka adalah Nafi' bin Abi Nu'im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umaiyah, Abu An-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lain-lainnya. Dari golongan sahabat Imam Malik yang berguru kepadanya adalah Sufyan Ath-Thauri, Al-Liat bin Sa'ad, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf, Syarik ibnu Lahi'ah dan Ismail bin Kathir dan lain-lain. Di antara murid-muridnya juga ialah Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman ibnu Al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin Al-Furat, Abdul Malik bin Al-Majisyum, dan Abdullah bin Abdul Hakim²⁴.

C. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menulis dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-

²³*Ibid.*

²⁴Ahmad Asy-Syurbasi, *op,cit*, h. 90

murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Malik, kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran yang sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa isyarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa dan lebih-lebih dalam kitabnya *al-Muwaththa'*. Dalam *al-Muwaththa'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil “tradisi orang-orang Madinah” sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah, serta mengambil hadits *munqati'*²⁵ dan *mursal*²⁶ sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu²⁷.

Qadhi 'Iyadh mengungkapkan bahwa cara Imam Malik dalam mengambil hukum adalah senantiasa mengutamakan ayat-ayat al-Qur'an dalam menyusun dalil-dalilnya yang jelas, memulai dengan nasnya, kemudian zahirnya lalu mafhumnya. Setelah itu barulah Imam Malik beralih kepada hadits, dengan mengutamakan hadits *mutawatir*²⁸, lalu *masyhur*²⁹, dan barulah ia menggunakan

²⁵Hadis *Munqati'* yaitu terjadinya keterputusan *sanad* pada generasi sebelum sahabat dan tidak secara berturut-turut, apabila keterputusan *sanad* tersebut lebih dari satu orang perawi.

²⁶Hadis Mursal yaitu hadis yang diangkat oleh tabi'in kepada Rasul Saw dari perkataan atau perbuatan atau taqir beliau.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 215

²⁸Hadis *Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil secara adat mereka akan sepakat untuk melakukan berdusta, (yang diterimanya) dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka, dari awal sanad sampai kepada akhir sanad, dengan syarat tidak rusak (kurang) jumlah perawi tersebut pada seluruh tingkatan sanad.

²⁹Hadis *Masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat *mutawatir*.

hadits *ahad*³⁰. Dengan cara yang tertib sebagaimana ia mengambil hukum dari al-Qur'an. Setelah al-Qur'an dan hadits, Imam Malik berpindah kepada *Ijma'*. Apabila dalam sumber-sumber pokok itu tidak menjumpai pemecahannya, barulah beliau menempuh jalan qiyas yang dijadikan sandaran untuk menyimpulkan suatu hukum³¹.

Begitu pula *al-Qurafi* dalam kitabnya *Tanqih al-Ushul* menyebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Malik adalah *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *Ijma'*, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul sahabat*, *masalah mursalah*, *'urf*, *sad al-dzara'i*, *istihsan* dan *istishab*³².

Namun secara jelas, akan penulis gambarkan metode *istinbath* hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam, di mana beliau berpegang kepada :

a. Al-Qur'an

Imam Malik meletakkannya di atas segala dalil, didahulukan daripada sunnah karena Al-Qur'an merupakan sumber syari'at sampai hari kiamat.

b. Sunnah

Sunnah menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an. Manhaj Imam Malik dalam meng-*istinbath* hukum dari sunnah adalah mengambil hadits mutawatir, hadits masyhur di zaman *tabi'in* atau *tabi' tabi'in*, dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu, menggunakan *khbar ahad* walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.

³⁰Hadis *Ahad* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis *Mutawatir* atau hadis *Masyhur*.

³¹Muhammad Ali al-Sayis, *Nash-ah al-Fiqh al-ijtihadi wa arwaruhu*, (tt : Majmu' al Buhus al-Islamiyah, 1970), h. 96

³²Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 218

c. *Ijma' Ahl al-Madinah*

Imam Malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (*Amal Ahl al-Madinah*), apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah. Madinah adalah negeri tempat Rasulullah Saw berhijrah dari Makkah, di situ beliau lama berdomisili menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di negeri tersebut bergaul lama dengan Rasulullah Saw dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, dan mereka adalah anak didik langsung Rasulullah Saw. Praktek-praktek keagamaan para sahabat, menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi dari Rasulullah Saw, dan seterusnya praktek-praktek keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan seterusnya sampai kepada Imam Malik. Dengan demikian, praktek penduduk Madinah yang disepakati atau praktek mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah Saw sehingga harus dijadikan sumber hukum.

Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khbar ahad*, sebab *ijma ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khbar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijma ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan :³³

- 1) Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya *al-naql*, yakni hasil dari mencontoh Rasulullah Saw, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah.
- 2) *Amalan ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab

³³Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 107

Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada *amalan ahl al-Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Saw.

- 3) *Amalah ahl al-madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu kedua dalil tersebut ada yang merupakan *amalan ahl al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh *amalan ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki.
- 4) *Amalan ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw, *amalah ahl al-Madinah* seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

d. Fatwa Sahabat

Imam Malik mengambil fatwa sahabat karena fatwa sahabat adalah hadits yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama dari para Khulafa ar-Rasyidin jika memang tidak ada nash dalam masalah tersebut. Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah Saw.

e. *Khabar ahad*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah

dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil isitinbath, kecuali *khavar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*.

f. *Qiyas*

Imam Malik menggunakan *qiyas* dengan maknanya menurut istilah, yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada *nash*-nya dengan masalah yang sudah ada *nash*-nya karena ada persamaan dalam aspek *illat*-nya. Contohnya, dalam al-Qur'an dan Hadits tidak pernah disebutkan haramnya *nabiz* dan minuman keras lainnya selain *khamar* seperti alkohol dan lainnya, maka Imam Malik dan jumhur ulama menetapkan haramnya itu dengan menqiyaskannya kepada *khamar* yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat al-Maidah ayat 90, yang artinya, "sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah..."

g. *Al-Istihsan*

Istihsan yaitu menguatkan hukum satu kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah *qiyas*, menurut mazhab Maliki, *al-Istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal mursala* daripada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Contohnya adalah Allah melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada dan mengadakan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, namun Dia memberikan

kemurahan secara *istihsan* pada *salam* (pemesanan), sewa-menyewa, *muzara'ah*, dan lain sebagainya. Semua contoh itu adalah akad, sedangkan sesuatu yang diakadkan tidak ada pada waktu akad berlangsung. Segi *istihsan*-nya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka.

h. *Al-Mashlahah al-mursalah*

Maslahah Mursalah yaitu merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya, dengan demikian maka *maslahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Contohnya adalah fatwa Imam Malik tentang barang palsu yang ditemukan di tangan pemalsunya, barang tersebut boleh diambil dengan paksa oleh penguasa dan disedekahkan kepada fakir miskin sekalipun banyak jumlahnya. Imam Syatibi menjelaskan bahwa dalam hal tersebut Imam Malik meniru perbuatan Umar bin Khattab yang pernah menumpahkan susu palsu yang dicampur dengan bahan lain oleh penjualnya³⁴.

Para ulama yang berpegang kepada *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut :

- 1) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *maslahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *maslahah* tersebut harus merupakan *maslahah* bagi kebanyakan orang.

³⁴Ensikolpedi Hukum Islam. (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1096

3) Masalahah itu harus benar-benar merupakan *masalahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma’.

i. *Sadd al-Zara’i*

Imam Malik menggunakan *Sadd al-Zara’i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang maka hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Contohnya, menurut Imam Malik seorang isteri yang ditalak *ba’in* ketika suaminya sakit keras tetap mendapat harta warisan dari suami yang menceraikannya, meskipun suami itu baru wafat setelah habis masa iddahny. Alasanny, tindakan suami menceraikan isteriny waktu sakit keras patut diduga untuk menghindar dari aturan waris.

j. *Istishab*

Imam Malik menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah, tetapny suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya, seorang yang telah yakin berwudhu dan dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah belum batal wudhunya. Sebaliknya apabila ada seorang yang belum berwudhu dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan

tentang sudah berwudhu atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu.

k. *Syar'u man Qablana Syaru'un lana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *Syar'u man Qablana Syaru'un lana* sebagai dasar hukum. Menurut Abdul Wahab, bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberitakan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau al-Sunnah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita, begitu juga sebaliknya.

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqh Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan dari fakultas *ahl al-hadits* yang muncul di Hijaz. Penggunaan qiyas, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa Imam Malik mendahulukan “perbuatan orang-orang Madinah” dari pada penggunaan *qiyas*. Sampai sejauh ini, Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas, Ibn Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadits sedemikian rupa, sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada nash yang jelas³⁵.

³⁵Farouq Abu Zaid, *op. cit*, h.23

D. Karya-Karya Imam Malik

Kecintaan Imam Malik kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan ilmu yang beliau dapatkan, melahirkan kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam waktu itu hingga sekarang.

Di antara karya-karya Imam Malik tersebut adalah Kitab *al-Muwaththa'*, merupakan karya monumental Imam Malik yang masih ditemukan sampai sekarang. Kitab ini memuat hadits-hadits shahih, perbuatan orang-orang madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh. Keistimewaan dari kitab *Al-Muwaththa'* adalah bahwa Imam Malik merinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang diambil dari hadits-hadits dan *atsar*. Kitab yang disusunnya selama empat puluh tahun ini sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif di bidang hadits dan fiqh. Sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik pada masa itu³⁶.

Adanya aspek hadits dalam kitab ini, adalah karena *al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw atau dari Sahabat dan Tabi'in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu : Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany

³⁶*Ibid.*

(Bashra), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam)³⁷.

Imam Malik mengumpulkan sejumlah besar hadits dalam kitabnya *al-Muwaththa'* itu kemudian memilihnya selama bertahun-tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan, bahwa Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* telah mengumpulkan 4.000 buah hadits. Hadits-hadits itu dipilih oleh Imam Malik setiap tahun, mana yang lebih sesuai untuk kaum muslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran.

Adapun yang dimaksud kandungan dari aspek kitab Fiqih, adalah karena *al-Muwaththa'* itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqih. Ada bab kitab Thaharah, kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab Shiyam, Kitab Nikah dan seterusnya. Setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa pasal, yang setiap pasalnya mengandung pasal-pasal yang hampir sejenis, seperti pasal shalat jama'ah, shalat safar, dan seterusnya.

Dengan demikian Kitab *al-Muwaththa'* adalah kitab yang memuat hadits dan fiqih, kehadiran kitab ini telah membuka cakrawala berpikir umat terhadap bagaimana cara menulis sunnah, kemudian mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan ulama. Banyak ulama yang datang minta riwayat hadits dari Imam Malik. Melihat sambutan yang sangat semarak itu, al-Manshur berhasrat untuk menyebarkannya ke berbagai daerah. Namun Imam Malik melarangnya, sebab para sahabat menyebar di mana-mana dan mereka

³⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 117

meriwayatkan suatu hadits yang tidak diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang dipegang oleh Imam Malik³⁸.

Di antara karya Imam Malik lainnya adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisaburi yang berasal dari Tunis. Asad ibn Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik, dan pernah mendengar *al-Muwattha'* dari Imam Malik kemudian ia pergi ke Irak. Asad ibn Furat bertemu dengan dua orang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Imam Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut, terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban – jawaban Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut³⁹.

Demikianlah sejarah ringkas Imam Malik bin Anas yang merupakan salah seorang imam mazhab yang karya-karyanya menjadi rujukan bagi ulama sekarang dalam menetapkan suatu hukum.

³⁸Rasyad Hasan Khalil, *op. cit*, h. 184

³⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 119

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqh yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang¹.

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh :

1. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
3. Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu pada garis besarnya, perwalian itu dapat di bagi atas :

1. Perwalian atas orang
2. Perwalian atas barang

¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

3. Perwalian atas orang dalam perkawinannya².

Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, yang akan dibicarakan di sini ialah yang berhubungan dengan perwalian orang dalam perkawinannya.

Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia dan terhormat, karena pernikahan itu di samping menjadi wadah untuk mengembangkan umat manusia, lebih jauh lagi pernikahan itu merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai ibadah.

Sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, pernikahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh syari'at Islam. Dengan demikian, pernikahan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di hadapan Allah swt. Untuk itulah dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan, artinya terpenuhi syarat dan rukun tersebut menjadi ukuran sahnyanya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut, menjadi sebab tidak sahnyanya pernikahan yang dilaksanakan.

Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan menurut para ulama adalah

و اركانہ خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima : calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”³.

²*Ibid.*

³ Abdullah ibn Hajazi, *Hasyiyah al-Sarqawi 'ala Atthir*, (Mesir : Dar al-Fikr, th), Juz II, h. 23

Salah satu di antara rukun nikah itu adalah wali. Wali dalam pernikahan menempati urutan yang ketiga dalam urutan rukun nikah.

Wali secara etimologi berasal dari kata “*ولاية-وليا*” yang artinya ialah, dekat dengan⁴. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali didefinisikan dengan ; *Pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin pria)*⁵. Sedangkan menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya, azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan, mengatakan bahwa wali secara bahasa dapat berarti “wilayah, yang berarti; *Penguasaan dan Perlindungan*⁶.

Adapun pengertian wali secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, namun apabila dicermati dari beberapa definisi itu mengarah pada satu titik kesimpulan yang saling menguatkan. Untuk lebih jelasnya, di antara definisi-definisi itu adalah :

1. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh ala-mazhab al-arba'ah mengatakan :

هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), Cet XIV, II, h. 1582

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), Cet. X, h. 1124

⁶Kamal Mukhtar, *loc. cit*

Artinya : “wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung padanya sah akad nikah, maka tidak sah (nikah) tanpa dia”⁷.

2. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya⁸.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan wali adalah seseorang yang mempunyai kekuatan hukum untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Atau seseorang yang mempunyai kekuasaan, sehingga bisa bertindak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Keberadaannya menjadi rukun dalam pernikahan yang akan dilaksanakan.

B. Dasar Hukum Perwalian

Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak mukallaf dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah :

⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *al-fiqh Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Libanon : Assyariah, 1973), Juz IV, h. 29

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 69

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

Artinya : "Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".(Al-Baqarah : 232)⁹

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria, bukan kepada kaum wanita, serta larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali, maksudnya ialah bahwa para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

Imam Bukhari meriwayatkan dari al-Hasan, ia berkata tentang sebab turunnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 232 ini, Al-Hasan berkata :

(فلا تعضلوهن) قال حدثني معقل بن يسار انها نزلت فيه قال زوجت اختا لي من رجل فطلقها حتي اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واکرمتك فطلقها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) فقلت الآن افعل يا رسول الله قال فزوجها اياه

⁹Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1993), h. 50

Artinya : "Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya, 'Aku menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, mantan suaminya datang lagi meminangnya. Aku berkata, 'dulu, kamu aku jodohkan, aku nikahkan, dan aku muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Kini, kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah, kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamlamanya". Lelaki ini orangnya biasa saja. Akan tetapi, bekas isterinya itu ingin kembali kepadanya, Allah lalu menurunkan ayat, '...maka janganlah kamu(para wali) menghalang-halangi mereka...' setelah itu, aku berkata, "sekarang, aku menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya". Aku pun menikahkan saudaraku itu kepadanya..."¹⁰

Dari riwayat Hasan di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa seorang wali berhak menghalangi yang diwalikannya, dan pernikahan tidak akan terjadi jika tanpa ada wali, terbukti riwayat Ma'qil di atas ia menghalangi pernikahan kembali adiknya sehingga turunnya surat al-Baqarah ayat 232 di atas.

Al-Hafiz dalam *Fathul Bari* berkata, "yang paling tepat dari sebab turunnya ayat tersebut adalah riwayat Hasan ini dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu tidak ada, untuk apa disebutkan "menghalang-halangi". Kalau wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentu ia tidak perlu kepada saudara lelakinya tersebut. Sebab barang siapa yang perkaranya menjadi kekuasaannya sendiri, tentulah ia tidak akan dikatakan kepada orang lain "menghalang-halangi", jika memang tidak setuju pada tindakannya¹¹.

Dari hadits Rasulullah saw tentang perlunya wali dalam pernikahan ini adalah, hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa,

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pengantar Imam Hasan Al-Banna, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), jilid 3, h. 12

¹¹*Ibid.*

عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(

Artinya : “Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw berkata Tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya)¹²

C. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai yang masih kecil. Di karenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun bagi perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah atau dikenal juga dengan Imam Hanafi mengatakan bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik ia perawan (gadis) ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat,

¹²Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan’ani, *Subulussalaman syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Kutubul ilmiah, th), jilid 3, h. 227

orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari *mahar mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan aqad nikahnya. Kemudian apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki dengan *mahar* kurang dari *mahar mitsil*, *qadhi* boleh meminta membatalkan aqadnya bila *mahar mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya¹³.

Kafa'ah/kufu, artinya persamaan atau persesuaian. Bagi orang-orang yang menganggapnya sebagai syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan menjadi isterinya).

Hal-hal yang diharuskan *se-kufu* menurut Imam Abu Hanifah ialah :

1. Islam
2. Merdeka,
3. Keahlian
4. Nasab, dan
5. Harta atau kelapangan hidup

Demikianlah hal-hal yang harus *se-kufu* menurut Imam Abu Hanifah, bila seorang wanita menikah tanpa wali atau mengawinkan dirinya sendiri. Selanjutnya Imam Abu Hanifah menambahkan, dalam hal seorang wanita menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri, wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi, *mahar mitsil* dan *qadhi* yang menikahkan.

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk, (Jakarta : Lentera, 1992), cet. Ke.2, h. 345

Selanjutnya berdasarkan riwayat Asyhab, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga di anut dan dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i. Imam al-Syafi'i menambahkan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, terpenuhinya rukun ini menjadi salah satu sebab sahnya pernikahan, sebaliknya tidak adanya wali dalam pernikahan menyebabkan pernikahan itu tidak sah.

Namun demikian berdasarkan riwayat Ibnu al-Qasim dari Imam Malik, ia mengatakan bahwa persyaratan wali itu sunnat hukumnya dan bukan fardhu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat adanya waris yang mewarisi antara suami dan isteri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan juga bahwa wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakili kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Dengan demikian, seolah Imam Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Malik negeri Baghdad yang mengatakan wali itu termasuk syarat sahnya nikah, bukan syarat kelengkapan¹⁴.

Berkenaan dengan masalah wali ini, Imam Ahmad bin Hanbal juga mensyaratkan bahwa kehadiran seorang wali dalam suatu pernikahan adalah

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, Imam Ghazali Said, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke-3, h. 410

menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Konsekuensinya ialah perkawinan yang dilangsungkan tanpa seorang wali adalah batal¹⁵.

Silang pendapat ini disebabkan tidak terdapatnya satu ayat pun atau hadits yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Namun ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai sebagai alasan oleh fuqaha yang mensyaratkan wali, hanya memuat kemungkinan yang demikian itu.

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

Artinya : "Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."(Al-Baqarah : 232)¹⁶

Dari ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin.

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit*, h. 346

¹⁶Mahmud Yunus, *loc. cit*

Demikian pula ayat-ayat dan hadits-hadits yang dipakai sebagai alasan oleh fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian¹⁷.

Hadits-hadits tersebut, di samping kata-katanya hanya memuat kemungkinan-kemungkinan tersebut, ternyata dari segi kesahihannya pun masih diperselisihkan, kecuali hadits Ibnu Abbas ra meskipun demikian fuqaha yang meniadakan wali juga tidak mempunyai dalil, Karena pada dasarnya segala sesuatu adalah bebas dari kewajiban (al ashlu bara'atudz dzimmah)¹⁸.

D. Macam-macam wali

Adapun macam-macam wali dapat digolongkan berdasarkan sudut pandang yang dipakai untuk itu, antara lain :

1. Melihat kedudukan pemangku perwalian

Pertama, Wali Nasab, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan¹⁹. Wali nasab ini mempunyai kewenangan perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat.

¹⁷Ibnu Rusyd, *loc. cit*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), Cet ke-1, h. 46

Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :

- a) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ; Ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- c) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka²⁰.

Urutan kedudukan kelompok tersebut di atas dituruti. Apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung daripada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna

²⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), h. 66

wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

Kedua, Wali Hakim, Wali hakim yang dimaksud di sini adalah penguasa atau petugas yang ditunjuk langsung secara resmi menjadi wali dalam pernikahan. Wali hakim ini baru bisa menikahkan seorang perempuan, apabila wali perempuan tersebut enggan atau tidak mau menikahkannya dengan laki-laki yang *se-kufu* atau sederajat dengan perempuan tersebut. Dengan kata lain wali hakim hanya berfungsi sebagai wali pengganti jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Dasar hukum dapatnya wali hakim menikahkan ialah sabda Rasulullah saw :

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل

فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان

ولي من لا ولي له

Artinya : "Dari 'Aisyah ra. Dia berkata : Rasulullah saw telah bersabda : perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh wali, maka nikahnya batal, apabila suami telah melakukan hubungan suami isteri, maka perempuan itu mendapat mahar lantaran telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila wali itu enggan maka sultanlah yang menjadi wali bagi wanita yang tidak ada wali"²¹.

2. Melihat objek perwaliannya

Para ulama fiqh sependapat bahwa wali dalam perkawinan (*wilayah tazwij*) ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi wali *mujbir* dan wali *Ghairu mujbir*.

²¹Ali Abdillah ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr,th), jilid 1, h. 605

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu²². Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *mujbir* adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Dalam beberapa hal, kalangan ulama fikih berbeda pendapat. Imam Malik dan ulama lainnya, selain ulama mazhab Syafi'i, sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki atau perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i mengemukakan satu pengecualian dari hal di atas, yaitu anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi. Menurut mereka anak itu tidak boleh dipaksa kawin, sesuai dengan hadits yang berbunyi :”... janda itu diminta pendapatnya (dalam mengawinkan mereka)...”(HR. Bukhari dan Muslim)
- b) Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal. Menurut jumhur ulama, selain ulama Mazhab Hanafi, wanita tersebut juga termasuk dalam wewenang wali *mujbir*. Mereka sepakat mengatakan bahwa ‘*illat*-nya adalah masih perawan. Ulama mazhab Hanafi tidak sependapat dengan jumhur ulama karena menurut mereka, ‘*illat*-nya adalah masih kecil.
- c) Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina. Ulama mazhab Maliki menetapkan, wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali *mujbir*. Menurut mereka, wanita itu boleh

²²Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Van Hoeve, 2000), h. 1337

dipaksa menikah karena status mereka masih sebagai *al-bikr* (belum pernah menikah). Berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa seorang wanita yang telah kehilangan keperawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi.

Sedangkan wali *ghair mujbir*, yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

3. Melihat jauh dekatnya hubungan kekerabatan

Memandang kepada jauh-dekatnya hubungan pertalian darah antara yang diwalikan dengan walinya, wali dapat dibagi menjadi wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Misalnya kakek dengan ayah dan anak cucu. Maka dalam hal ini ayah sebagai wali *aqrab* dan kakek menjadi wali *ab'ad*, dan anak sebagai wali *aqrab* sedangkan cucu menjadi wali *ab'ad*.

E. Syarat-Syarat Wali

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menunjukkan pengertian dan kedudukan wali dalam pernikahan. Maka, Seorang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu demi keabsahan suatu pernikahan. Karena syarat ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat. Persyaratan wali nikah tersebut dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berhak menjadi wali itu ialah :

1. Mukallaf

Wali haruslah orang yang mukallaf (dewasa), karena orang yang mukallaf dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam arti anak kecil tidak berhak menjadi wali. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang berbunyi :

: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَمِلَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

يَفِيْقَ ()

Artinya : “Di angkatkan hukum itu dari tiga perkara : dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa), dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”.(HR. Bukhari dan Muslim)

2. Muslim

Disyaratkan wali nikah haruslah orang Islam apabila orang yang menikah itu beragama Islam, maka tidak boleh yang menjadi wali dari orang non Islam, kecuali orang Islam juga, hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat Al-Imran ayat 28 :

لَا يَخْذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah”²³.

Perwalian atas orang-orang kafir dilakukan dan diangkat oleh dan dari orang kafir sendiri berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 73 yang artinya :...”Adapun orang kafir sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain.”

²³Mahmud Yunus, *op. cit*, h. 72

3. Laki-laki

Wali nikah mesti orang laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi wali. Para ulama fiqh berbeda pendapat masalah wanita sebagai wali, Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah suatu pernikahan apabila wanita yang menjadi walinya dan tidak sah pula pernikahan apabila wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu pernikahan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri²⁴.

Pendapat Imam Malik di atas beralasan dengan hadits Nabi saw :

ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
تزوج المرأة نفسها (رواه الدارقطني و ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abi Hurairah ra berkata : berkata Rasulullah Saw “wanita itu tidak (sah) menikahkan wanita lain dan tidak (sah) pula menikahkan dirinya sendiri”²⁵.

Sedangkan Imam Abu Hanifah beralasan dengan hadits :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم احق بنفسها
من وليها والبكر تستأذن في نفسها و اذنها صماتها (

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra ia bersabda,”bersabda Rasulullah saw orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan) dirinya

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, th), juz VII, h. 196

²⁵Muhammad bin Ismail Amir Yamni Ash-Shan'ani, *op. cit*, h. 232

daripada walinya, dan gadis itu dimintakan izinnnya kepadanya, dan (tanda) izinnnya ialah diamnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁶

4. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

5. Berpikiran baik

Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

6. Rasyid

Wali disyaratkan harus orang yang *rasyid* (berakal, bijaksana, cerdas). Artinya, ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, karena orang yang *safih* (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, apalagi mengurus diri orang lain. Dan mungkin orang seperti ini akan menjodohkan perempuan perwaliannya dengan orang yang bodoh sepertinya, dan ini akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan orang yang tidak sesuai.

7. Adil

Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara maruah atau sopan santun.

8. Tidak sedang dalam melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

²⁶Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Mesir : Syirkah Maktabah, 1964), jilid. 5, h. 69

Demikianlah konsep secara umum masalah perwalian dalam perkawinan, jika dilihat para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan wali sebagai rukun nikah atau tidak, dan juga berbeda dalam menetapkan kekuasaan wali yang berakibat berbedanya hak *ijbar* wali nantinya.

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN IMAM MALIK BIN ANAS

TENTANG HAK IJBAR WALI

1. Konsep Hak Ijbar Wali Menurut Imam Malik bin Anas

Secara etimologi, kata *ijbar* ini berasal dari bahasa Arab yaitu اجبر ,
اجبار, يجبر yang artinya paksaan¹.

Sedangkan menurut istilah dalam kitab *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah* dijelaskan :

ولي مجبر له حق تزويج بعض من له عليه الولاية بدون اذنه ورضاه

Artinya : "Wali *mujbir* adalah suatu hak yang dipunyai oleh seorang wali untuk menikahkan orang yang berada di bawah kekuasaannya tanpa meminta izin terlebih dahulu dari orang yang dinikahkan tersebut"².

Para ulama mazhab sudah mengakui tentang adanya hak *ijbar* ini, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang siapa saja wali yang mempunyai hak *ijbar* ini dan siapa saja yang bisa dipaksa untuk dinikahkan.

Secara umum Imam Malik berpendapat bahwa tingkatan wali terbagi dua³, yaitu wali *mujbir* yaitu wali yang mempunyai wewenang langsung untuk

¹Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid al-Thulah*, (Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. Ke-15, h. 70

²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Darul Kutubul ilmiah, 1990), h. 31

³Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, th), Juz VII, h. 201

menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu, dan wali *ghair mujbir* yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

Imam Malik memandang tidak semua wali mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan orang di bawah perwaliannya tanpa izin orang itu, wali yang mempunyai hak *ijbar* tersebut adalah :

a. Pemilik Budak walaupun perempuan

Bagi pemilik budak, boleh menikahkan budaknya atau hambanya dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada budak tersebut seperti menikahkan kepada orang yang mempunyai kelainan bentuk, misalnya mempunyai penyakit kusta maka tidak ada *ijbar* bagi si pemilik tersebut, dan budak tersebut boleh mempasakh pernikahannya sekalipun pernikahan sudah lama berlangsung. Dalam hal ini pemilik budak atau tuan didahulukan dari ayah.

b. Ayah yang cerdas atau bodoh

Maka baginya boleh menikahkan bikir walaupun sudah perawan tua, bahkan telah sampai umurnya 60 tahun atau lebih, maka baginya ada hak *ijbar* sekalipun tanpa *mahar mitsil*, tidak *sekufu* ataupun menikahkannya dengan orang yang jelek sekalipun.

c. Penerima wasiat ayah, ketika tidak ada ayah dengan tiga syarat :

- 1) Ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya itu atau ayah mewasiatkan untuk memilihkan suami anaknya
- 2) Maharnya tidak boleh rendah dari *mahar mitsil*

3) Calon suami yang dipilihkan tersebut tidak fasik⁴.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa menurut Imam Malik orang yang mempunyai hak *ijbar* itu hanya tiga orang yaitu pemilik budak, ayah, dan orang yang menerima wasiat dari ayah ketika ayah tidak ada.

Dalil Imam Malik dalam menetapkan wali *mujbir* ini bagi ayah adalah *ijma'*, bahwa ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang bikir dan kecil dengan dalil Abu Bakar pernah menikahkan anaknya A'isyah dan dia masih berumur 7 tahun kepada Nabi Saw.

Sedangkan dalil tentang penerima wasiat dari ayah, Imam Malik memandang bahwa ia menjadi pengganti ayah, sebagaimana boleh bagi ayah mewakilkan kepada orang lain sewaktu ia hidup, maka boleh bagi penerima wasiat untuk menggantikan ayah ketika ia telah wafat.

Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat yang menjadi wali *mujbir* tersebut hanya dua orang, yakni ayah dan kakek saja, ayah boleh menikahkan perempuan bikir kecil atau besar tanpa minta izin darinya dan tidak boleh menikahkan janda kecuali dengan izinnya walaupun janda itu masih kecil maka tidak boleh dinikahkan hingga ia dewasa⁵. Golongan Hanafiyah

⁴*Ibid.*

⁵ *Ibid.*

berpendapat, wali *mujbir* berlaku bagi ‘*ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya⁶.

Sedangkan wali *ghair mujbir* menurut Imam Malik adalah⁷ :

- 1) Anak laki-laki sampai ke bawah
- 2) Ayah
- 3) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- 4) Kakek (ayah dari ayah)
- 5) Paman, kemudian anak laki-lakinya dengan mendahulukan yang kandung daripada seayah dan seibu.
- 6) Ayah kakek, paman kakek, dan anak laki-lakinya
- 7) Orang yang memerdekakan budak wanita
- 8) Hakim
- 9) Apabila kedelapan di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada paman (saudara ibu), kakek (ayah dari ibu), saudara laki-laki seibu, dan setiap orang Islam.

Imam Malik memandang bahwa di dalam perkawinan orang Islam, wali berfungsi sebagai rukun nikah. Artinya, tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali di saat akad tersebut berlangsung. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 63

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 204

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْصُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
 ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ

Artinya : "Apabila menceraikan isteri-isterimu kemudian selesai iddah mereka, janganlah kamu (para wali), menghalangi mereka (bekas isteri-isteri tersebut) untuk menikah dengan lelaki lain (calon) suami mereka. apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"⁸.

Ayat ini menjelaskan, jika wali tidak diperlukan, tentulah larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Ma'qil bin Yasar yang telah menikahkan saudara perempuannya, kemudian diceraikan oleh suaminya (talak *raj'i*) dan ditinggalkannya sampai habis masa iddahnya, kemudian ia bermaksud ingin menikahinya lagi. Ma'qil marah dan bersumpah tidak ingin menikahkannya, lalu turunlah ayat ini.

Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadits Nabi Saw,

عن ابي موسي الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي

Artinya : "Dari Abi Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah Saw bersabda tidak sah nikah melainkan dengan wali"⁹.

Selanjutnya siapa saja yang boleh dinikahkan tanpa meminta izin dulu dari orang di bawah perwaliannya? Menurut Imam Malik, tidak ada *ijbar* dalam

⁸Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), h. 92

⁹Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, tt), Jilid 3, h. 227

pernikahan, dan tidak ada *ijbar* seseorang terhadap yang lain dalam pernikahan kecuali seorang ayah pada anak perempuannya yang bikir, pada anak laki-laknya yang kecil, pada budak dan hambanya¹⁰.

Imam Malik mengatakan, seorang wali boleh mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izinnnya adalah karena dua sebab, yakni, karena bikir dan kecil¹¹. Oleh sebab itu, orang yang berada di bawah perwalian yang boleh dikawinkan tanpa minta izin terlebih dahulu adalah :

1) Karena Bikir

Dalam hal bikir ini terbagi kepada dua :

Pertama, Seorang ayah menikahkan gadis kecil.

Imam Malik berpendapat bahwa gadis kecil dapat dikawinkan oleh ayahnya saja atau oleh orang yang memperoleh penyerahan dari ayah untuk melakukan itu, jika telah menentukan calon suami, kecuali jika dikhawatirkan akan menyebabkan kesia-siaan dan kerusakan terhadap gadis itu.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa gadis kecil tersebut dapat dikawinkan oleh setiap orang yang mempunyai kekuasaan atasnya baik ayah, keluarga atau lainnya. Dan baginya ada hak *khiyar* manakala telah mencapai usia dewasa (yakni hak untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinan tersebut)¹².

¹⁰Malik bin Anas, *Mudawwanah*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, th), jilid 2, h. 100

¹¹Wahbah Az- Zuhaili, *op. cit.* h. 190

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', th), juz II, h. 361

Dalil Imam Malik tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat at-Talaq ayat 4 :

وَاللَّائِي يَأْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ...

Artinya : ”Dan mereka yang telah putus haidnya (monopause) dari isteri-isterimu kalau kamu ragu, maka iddah mereka adalah tiga bulan. Demikian juga mereka yang tidak berhaid...”¹³.

Ayat ini menjelaskan bahwa iddah wanita yang sudah putus darah haidnya dan wanita yang belum haid adalah tiga bulan. Menurut Imam Malik, gadis yang masih kecil (belum dewasa) termasuk dalam golongan wanita yang belum haid, begitu juga menurut jumhur ulama.

Kemudian dalil kedua yang dikemukakan oleh Malik adalah, hadits A’isyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,

محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين و مكثت عنده تسعا

Artinya : ”Dari A’isyah ra bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun”¹⁴.

¹³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jamunu, th), h. 946

¹⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Darul Fikri : tt, 1981), juz 5, h. 134

Dalam hadits ini jelas, bahwa Nabi menikahi A'isyah pada usia enam atau tujuh tahun, yang menurut adat kebiasaan belum dewasa dan belum dapat disetubuhi.

Kedua, Gadis dewasa yang dinikahkan tanpa persetujuannya

Imam Malik berpendapat bahwa ayah sah menikahkan anak gadisnya yang telah baligh dan berakal¹⁵. Sedangkan batasan baligh menurut Imam Malik adalah gadis tersebut telah haid, sedangkan Imam Habib berpendapat baligh itu apabila telah berumur 18 tahun¹⁶.

Dalam mazhab Maliki selama gadis itu belum dipandang cerdas, ayahnya mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkannya kepada calon suami yang walaupun mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- a) Buta
- b) Rendah kedudukan atau kurang kemampuannya (dalam keuangan) dibandingkan dengan kedudukan gadis
- c) Buruk rupanya
- d) Hanya sanggup membayar mahar kurang dari *mahar mitsil*¹⁷.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang telah baligh tanpa minta izin terlebih dahulu, dengan syarat laki-laki tersebut :

¹⁵Ibnu Taimiyah, *Ahkaamuz zawaj*, (Beirut : Darul Kutubul 'ilmiyah, 1988), h. 98

¹⁶Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Kitab Al-Muntaqa' Syarh Muwatha'*, (Kairo : Darul Kitab Islam, tt), jilid 3, h. 267

¹⁷Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), jilid 1, h. 205

- a) Calon suami adalah sekufu
- b) Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil
- c) Tidak ada permusuhan antara gadis dan ayah atau antara gadis dengan calon suaminya¹⁸.

Hujjah yang digunakan oleh Imam Malik adalah, amalan penduduk Madinah, seperti perbuatan Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah yang menikahkan anak gadis mereka yang bikir dan mereka tidak memintai izin anak perempuan mereka tersebut. Kata Imam Malik, hal inilah yang berlaku menurut kami pada pernikahan gadis yang bikir¹⁹.

Adapun yang dijadikan dalil oleh Imam Malik adalah sebagai berikut :

- a) Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Jama'ah Ahli Hadits kecuali Bukhari :

حدثني مالك, عن عبد الله ابن الفضل, عن نافع بن جبير بن مطعم, عن عبد الله بن عباس, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم احق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها

Artinya : “Diceritakan kepadaku oleh Malik, dari Abdilllah ibn Fadhl, dari Nafi’ bin Jubair bin Mut’im dari Abdilllah ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw berkata : wanita janda lebih berhak pada dirinya dari walinya dan bikir dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”²⁰.

¹⁸Abi Syuja’, *al-Iqna’*, (Semarang: Toha Putra, th), juz II, h. 128

¹⁹Malik bin Anas, *loc. cit*,

²⁰Malik bin Anas, *Al-Muwatha’*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), h. 331

Didalam kitab al-Muntaqa' dijelaskan bahwa kata "Ayyim" adalah wanita yang tidak punya suami. Sedangkan *Qadhi* Abu Ishaq menjelaskan bahwa lafaz "Ayyim" itu adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik dia itu pikir ataupun janda yang baligh atau kecil, dengan mengecualikan pikir yang mempunyai ayah²¹. Sedangkan dalam kitab *Subulussalam* dijelaskan bahwa lafaz "ayyim" itu adalah wanita yang sudah berpisah dari suaminya baik karena ditalak atau ditinggal mati²².

Ibnu Qasim, ibn Wahab, dan Ali ibn Ziyad menjelaskan dari Malik dalam kitab *Mudawwanah* kata pikir tersebut maksudnya adalah wanita yang tidak mempunyai ayah (yatim) karena anak yatim tersebutlah yang dimintai izinnya, pendapat Imam Malik ini diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana riwayat hadits dari Ziyad bin Sa'ad :

عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب احق بنفسها و البكر يستأمرها ابوها واذنها صماتها

Artinya : "Dari Ziyad bin Sa'id dan Abdillah bin Fadl dari Nafi' bin Jabir, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw berkata, janda lebih berhak atas dirinya dan gadis itu ayahnya meminta izinnya mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya"²³.

²¹Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *op. cit*, h. 266

²²Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *op. cit*, h. 230

²³Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Mesir : Syirkah Maktabah, 1964), jilid 5, h. 70

Sahnun menjelaskan bikir ini ada tiga bentuk ²⁴:

1. Bikir yang baligh yang boleh dinikahkan dan dimintai izinnya, yaitu wanita yang dinikahkan oleh walinya, maksudnya adalah wanita dewasa yang tidak mempunyai ayah.
2. Bikir yang tidak boleh dinikahkan dan tidak dimintai izinya, yaitu anak yatim yang belum baligh, maka anak yatim tersebut tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya dan yang belum baligh tidak sah izinnya maka tidak sah pula pernikahannya.
3. Bikir yang boleh dinikahkan dan tidak dimintai izinnya yaitu bikir yang mempunyai ayah, maka ayah boleh menikahkannya tanpa izinnya dan dimintai izinnya itu lebih baik, namun demikian Ibn Habib mengatakan disunatkan bagi ayah untuk menyebutkan calon suami anaknya dan menerima kabar dari ibu atau yang lainnya tentang ridha atau tidaknya.

b) Hadits dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب احق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها و اذنها صماتها

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya"²⁵.

Hadits Ibnu Abbas ini menerangkan bahwa wanita itu ada dua golongan, yaitu janda dan gadis. Kekuasaan ayah selaku wali terhadap kedua golongan ini

²⁴Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *loc. cit*

²⁵Imam Muhammad bin Ismail Amir al-Yamni Ash-Shan'ani, *op. cit*, h. 231

tidak sama. Permulaan hadits tersebut menegaskan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. *Maḥmūḥ mukhalafah*nya menunjukkan bahwa ayah lebih berhak terhadap diri gadisnya. Hal ini diperkuat oleh *mantuq* hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni, yaitu :

الثيب احق بنفسها و البكر يزوجها ابوها

Artinya : “Janda lebih berhak terhadap dirinya, dan gadis itu ayahnya yang menikahkan”²⁶.

Menurut Imam Malik, inti dari hadits Ibnu Abbas tersebut adalah pembedaan keadaan perempuan janda dengan perawan. Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan bagi perawan, walinya lah yang berhak atasnya. Oleh karena walinya yang lebih berhak atas dirinya, maka wali boleh menikahkannya tanpa minta izin terlebih dahulu darinya.

2) Karena Kecil

Imam Malik berpendapat bahwa janda yang belum dewasa boleh dinikahkan oleh ayahnya tanpa izinnya. Imam Malik beralasan pada hadits-hadits yang menerangkan bahwa “janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya”, hendaklah dihtimalkan kepada janda yang sudah dewasa, karena keumuman kata janda dapat ditakhsiskan oleh kaidah umum yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu ayah berhak bertindak terhadap urusan anaknya yang belum dewasa²⁷.

²⁶Abi Syuja', *loc.cit*

²⁷Ibrahim Hosen, *op. cit*, h. 245

Dengan demikian, dapatlah dijelaskan bahwa ayah mempunyai hak *ijbar* terhadap puterinya yang mempunyai salah satu dari dua sifat, yaitu : gadis walaupun ia dewasa dan belum dewasa walaupun ia janda.

Pendapat Imam Malik ini, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak ada seorang pun wali yang dapat menikahkan janda yang belum dewasa, hal ini diikuti juga oleh Ibn Hazm, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad²⁸.

Dalil yang dipegang oleh pendapat ini adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Jama'ah Ahli Hadits :

الثيب احق بنفسها من وليها

Artinya :”Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya”²⁹.

Imam Abu Hanifah memandang bahwa tiap-tiap wali (tanpa pengecualian) mempunyai hak untuk menikahkan janda yang belum dewasa. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan oleh ayah atau datuk, wanita tersebut tidak mempunyai hak *khiyar* setelah ia dewasa. Akan tetapi, jika pernikahan tersebut dilangsungkan oleh wali selain ayah atau datuk, wanita tersebut mempunyai hak *khiyar* pada waktu ia dewasa.

Dengan demikian, hak *ijbar* ayah atau datuk menurut Imam Abu Hanifah terhadap puterinya digantungkan pada keadaan belum dewasanya, bukan pada kegadisannya.

²⁸*Ibid*

²⁹Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *loc. cit*

2. Metode Istinbath Hukum Imam Malik Dalam Menetapkan Adanya Hak Ijbar Wali

Setelah penulis teliti, dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan hak *ijbar* wali tersebut, metode yang digunakan adalah *Ijma' Ahlul Madinah*.

Berbicara masalah *Ijma' Ahlul Madinah*, termasuk salah satu metode yang digunakan Imam Malik dalam mengambil sebuah hukum. *Ijma' Ahlul Madinah* adalah persesuaian paham ulama-ulama Ahli Madinah terhadap sesuatu kasus³⁰.

Ijma' Ahlul Madinah ini ada dua macam, yaitu³¹ :

- a. *Ijma' Ahlul Madinah* yang berasal dari *an-Naql*, yaitu hasil dari mencontoh Rasulullah Saw bukan dari hasil ijtihad *ahl al-Madinah*, seperti tentang ukuran *mud*, *Sha'*, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Saw atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti azan di tempat yang tinggi dan lain-lain.
- b. Hasil ijtihad ulama-ulama Madinah

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud *ijma' ahl al-Madinah* tersebut adalah *ijma' ahl al-Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi Saw, sedangkan kesepakatan *ahl al-Madinah* yang hidup kemudian sama sekali bukan merupakan hujjah³².

³⁰H. A. Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.116

³¹Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), h. 89

³²*Ibid* .

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa, kesepakatan ulama Madinah adalah *ijma'* dan mempunyai kekuatan hujjah terhadap ulama lain yang menyalahinya. Di antara ulama Malikiyah ada yang menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan kehujjahan kesepakatan ulama Madinah itu adalah bahwa periwayatan ulama Madinah lebih kuat dibandingkan dengan periwayatan ulama lain di luar Madinah³³.

Sedangkan ulama Malikiyah yang lain mengulas bahwa kehujjahan berarti kesepakatan ulama Madinah lebih utama meskipun tidak dilarang menyalahinya. Ulama Malikiyah yang lain meluruskan pendapat ini bahwa yang dimaksud dengan ulama Madinah yang kesepakatannya menjadi hujjah itu adalah sahabat-sahabat Nabi di Madinah³⁴.

Alasan para ulama Malikiyah ini adalah³⁵ :

- a. Dari segi nash ada sabda Nabi yang mengatakan, "Madinah itu suci yang dapat menyapukan kotoran yang ada padanya sebagaimana bengkel besi yang menyapukan karat-karat besi".
- b. Secara logika, Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi dan tempat makamnya, tempat turun wahyu, tempat kedudukan Islam, dan tempat berkumpul para sahabat. Karena itu kebenaran tidak akan menghindar dari para ahlinya.

³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.145

³⁴*Ibid* .

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Suria : Darul Fikr, 1986), Juz I, h. 508-510

- c. Warga Madinah menyaksikan sendiri ayat-ayat hukum dan merupakan orang yang paling tahu tentang keadaan Rasul dibandingkan dengan warga kota lain.
- d. Periwiyatan ahli Madinah lebih diutamakan dari periwiyatan ahli lainnya. Karena itu kesepakatan ulama Madinah menjadi hujjah terhadap orang lain.

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu ³⁶:

- a. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya *naql*, yakni hasil dari mencontoh Rasulullah Saw.
- b. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.
- c. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan *ahl al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh amalan *ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki. Begitu pula bagi mazhab Syafi'i.
- d. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw, artinya sesudah zaman sahabat.

Dalam masalah hak *Ijbar* ini, sebagaimana dengan dalil yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam memahaminya Imam Malik berhujjah

³⁶Huzaiman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 107

dengan *Ijma' Ahl al-Madinah*. Seperti Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdillah menikahkan anak gadis mereka tanpa meminta izinnya, yang hal ini termasuk dalam *ijma' ahl Madinah* yang *naql*, karena perbuatan tersebut berlangsung berkelanjutan sejak zaman Nabi Saw hingga masa Imam Malik. Di samping itu Imam Malik juga menggunakan hadits-hadits Nabi Saw untuk memperkuat amalan-amalan penduduk Madinah tersebut.

Seperti hadits Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah Saw :

محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين و مكثت عنده تسعا

Artinya : "Dari A'isyah ra bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun"³⁷.

Dan juga hadits Ibnu Abbas :

حدثني مالك, عن عبد الله ابن الفضل, عن نافع بن جبير بن مطعم, عن عبد الله بن عباس, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم احق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها و اذنها صماتها

Artinya : "Diceritakan kepadaku oleh Malik, dari Abdillah ibn Fadhl, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari Abdillah ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw

³⁷Imam Bukhari, *loc. cit*

berkata : wanita janda lebih berhak pada dirinya dari walinya dan bikir dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”³⁸.

Dalam hadits ini, Imam Malik memandang bahwa seorang janda lebih berhak dari pada walinya terhadap dirinya, *Mafhum Mukhalafah*-nya adalah seorang bikir yang berhak adalah walinya. *Mafhum Mukhalafah* yang terdapat dalam hadits tersebut di atas, jenisnya adalah *mafhum sifat*, yaitu menggantungkan hukum pada salah satu sifat zat. Yang menjadi zat di sini adalah wanita dan sifatnya adalah gadis atau janda.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam memahami hadits ini adalah dengan cara memandang kepada *Mantuq Hadits*³⁹. Artinya janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan bikir, ayah harus minta izin kepadanya terlebih dahulu.

Dalam memandang *Mafhum Mukhalafah* ini, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa semua *mafhum mukhalafah* adalah hujjah kecuali *mafhum laqab*.

Golongan lain seperti Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm dari golongan ahli Zhahir menyatakan bahwa semua *mafhum mukhalafah* tidak dapat dijadikan hujjah. Alasannya adalah menyebutkan suatu sifat tidak berarti meniadakan sifat-sifat lainnya. Maka jika dikatakan bahwa orang hitam itu telah berdiri bukan berarti menyebutkan bahwa orang putih tidak berdiri.

³⁸Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *loc. cit*

³⁹Abdul Karim bin Ali bin Muhammad an-Naulah, *Ithafu Zawil Bashair bisyarhi Raudhatun Nazir fi Ushulul Fiqh 'ala Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal*, (Riyad : Daarul Asyimah, 1996), Cet. Ke-1, Jilid 6, h. 445

3. Analisa

Kita mengakui bahwa hukum Islam yang sudah disepakati ada empat, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan qiyas. Keberlakuan ke empat sumber hukum di atas sesuai dengan urutannya. Artinya, Al-Qur'an didahulukan dari hadits dan begitu untuk selanjutnya. Hal ini berdasarkan kepada hadits Rasulullah Saw ketika beliau mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال : اقضي بكتاب الله

قال : فان لم تجد في كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله قال : فان لم تجد في سنة رسول الله

قال : اجتهد رأيي و لا ألوا. فضرب رسول الله علي صدره و قال : الحمد لله الذي وفق

رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

Artinya : "Bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan ? Ia menjawab: Aku akan putuskan dengan Kitab Allah, Bersabda Rasulullah: Jika engkau tidak dapatkan dalam kitab Allah ? Ia menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya ? Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Ia menjawab ; Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku, maka rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhai oleh Rasulullah saw". (Ahmad, Turmudzi, Abu Daud)⁴⁰

Hadits ini menjelaskan kepada kita, bagaimana urutan yang menjadi sumber hukum dalam Islam, mulai merujuk kepada Al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an merujuk kepada hadits Nabi Saw, dan jika juga tidak ditemukan dalam hadits baru melakukan ijtihad.

⁴⁰Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), h. 71

Walaupun kita sepakat mengatakan Al-Qur'an dan hadits adalah sumber hukum Islam yang pertama, hal ini bukan berarti semua kita harus mempunyai pandangan atau pendapat yang sama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena pendapat setiap orang akan tergantung kepada sejauh mana kemampuannya untuk memahami nash tersebut. Dan pemahaman itu tergantung kepada pendidikan yang diperolehnya, tingkat intelegensinya serta tempat dan zaman dia hidup⁴¹.

Masalah yang tengah kita hadapi sekarang ini juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perbedaan pendapat seperti diungkapkan di atas. Namun demikian, yakinlah perbedaan itu adalah rahmat, jika kita selesaikan dengan arif dan bijaksana.

Jika diperincikan dalam hak *ijbar* wali ini, terbagi dalam empat bentuk : wali menikahkan bikir, wali menikahkan janda, dan ditambah dengan melihat besar atau kecilnya bikir dan janda. Dalam masalah hak *ijbar* wali ini, para ulama ada dalam beberapa hal sepakat, seperti pada wanita janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya kecuali ada perintahnya, dan pada gadis yang masih kecil, boleh dinikahkan tanpa dimintai izinnya.

Pada lembaran sebelumnya sudah dijelaskan pendapat Imam Malik tentang hak *ijbar* dalam perkawinan. Menurut beliau hak *ijbar* itu hanya dipunyai oleh ayah, pemilik budak, dan orang yang menerima wasiat dari ayah. Dan

⁴¹Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, 1993), h. 120

ijbarnya berlaku terhadap anak perempuan yang belum pernah menikah baik masih kecil maupun sudah dewasa, dan janda yang masih kecil.

Sebagai dasar dari pendapat Imam Malik itu adalah, beliau berhujjah dengan amalan penduduk Madinah. Seperti terlihat dalam kitab *Muwatha'* :

حدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد, و سالم ابن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الابكار,
ولا يستأمران

Artinya: "Sesungguhnya Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah menikahkan anak perempuan mereka yang bikir dan tidak dimintai izinnya"⁴².

حدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد و سالم ابن عبد الله و سليمان بن يسار كانوا
يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها : ان ذلك لازم لها

Artinya : " Sesungguhnya Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah dan Sulaiman bin Yasar mereka mengatakan tentang bikir, ayahnya lah yang menikahkan tanpa izinnya, sesungguhnya demikianlah berlaku baginya"⁴³.

Jika dilihat biografi Qasim bin Muhammad ini, dia adalah seorang ahli Fiqh dari Madinah, ia banyak mendengar hadits Nabi dari Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lain. Yahya bin Sa'id berkata: "Kami tidak mendapatkan

⁴²Malik bin Anas, *loc.cit*

⁴³*Ibid.*

seorang di Madinah yang kami utamakan atas Qasim”. Abu Zunad berkata: ”Saya tidak melihat seorang ahli Fiqh yang lebih pandai As-Sunnah dari padanya”⁴⁴.

Begitu juga dengan Salim bin Abdullah, Malik pernah berkata bahwa pada zamannya tidak ada seseorang yang lebih mencontoh orang-orang shalih pada masa lampau dalam zuhud dan keutamaan daripada Salim. Ia meninggal pada tahun 106 H⁴⁵.

Ijma’ ahl al-Madinah di atas, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah :

محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين و مكثت عنده تسعا

Artinya : ”Dari A’isyah ra bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun”⁴⁶.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها و اذنها صماتها

⁴⁴Hudhari Bik, *Tarikh Tasyr’i*, terjemahan Mohammad Zuhri, Sejarah Pembinaan Hukum Islam, (Indonesia : Daarul Ihya, 1980), h. 306

⁴⁵*Ibid* .

⁴⁶Imam Bukhari. *op. cit*, h. 134

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya"⁴⁷.

Pendapat yang sama dengan Imam Malik ini adalah Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah mengatakan *ijbar* tidak berlaku bagi gadis yang sudah dewasa dan wanita janda⁴⁸.

Setelah penulis mempelajari pendapat Imam Malik yang ada dalam kitab *Al-Muwattha'* dan ditambah dengan kitab-kitab lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, maka penulis cenderung sependapat dengan Imam Malik.

Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini, yang menentukan adalah ayah, hal ini menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbar*. Hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain, dalam hal ini adalah ayahnya.

Secara singkat mengenai beberapa kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan paksaan/memaksa atau yang memiliki konotasi yang sama. Kata-kata itu antara lain adalah *ikrah* dan *taklif*. Kedua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan paksaan atau memaksa, atau dibebani/diwajibkan mengerjakan sesuatu.

⁴⁷Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *loc. cit*

⁴⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit*, h. 31

Kata ketiga adalah *ijbar*, di dalam kamus Al-Munawwir, misalnya, dikatakan : *ajbarahu'ala al-amr* berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan.

Di dalam ketiga kata Arab tersebut sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk dapat memahami persoalan dalam kajian ini. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani atau pikirannya.

Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut (*mukallaf*) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui sesuatu keyakinan. Sebagai contoh adalah shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Ini juga sama dengan kewajiban untuk melaksanakan suatu aturan, Undang-Undang Negara atau organisasi.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqh Islam, istilah *ijbar* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh mazhab Maliki, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau orang yang menerima wasiat dari ayah. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir* maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dan

perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali *mujbir* dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, yang ada dalam masyarakat kita, dan masih berlaku sampai hari ini, muncul istilah kawin paksa, satu istilah yang memiliki konotasi *ikrah*, pemaknaan *ijbar* dengan konotasi *ikrah* tentu saja tidak benar.

Dengan memahami makna *ijbar* di atas, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hal itu merupakan hak untuk mengawinkan. Jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan. Sebab, *ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka. Dengan asumsi bahwa anak perempuan belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Mengenai anak-anak yang masih kecil, para ulama sepakat bahwa ada hak *ijbar* seorang wali untuk menikahkannya. Keberlakuan hak *ijbar* terhadap anak-anak ini disebabkan karena anak-anak itu belum mampu bertindak sendiri, karena akalunya belum bisa menentukan mana yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu, segala yang menyangkut dirinya sendiri diserahkan kepada walinya, tidak terkecuali masalah perkawinan.

Mengenai anak gadis yang sudah dewasa, bagi mereka yang sudah dipandang cerdas oleh ayahnya dengan cara mengumumkannya bahwa ia sudah cerdas dengan mengetahuinya dengan ketetapan atau dengan bukti-bukti, maka dalam keadaan seperti ini seorang ayah tidak boleh menikahkannya kecuali meminta izin dulu kepadanya, artinya Imam Malik ternyata juga memandang bagaimana keadaan seorang gadis itu juga, kalau dia sudah cerdas maka seorang ayah tidak boleh menikahkannya, tetapi jika lemah anak gadisnya maka seorang ayah boleh menikahkan tanpa izinnnya.

قال مالك : و ليس للبكر جواز في مالها حتي تدخل بيتها و يعرف من حالها

Artinya : “ Tidak boleh bagi pikir terhadap hartanya, sehingga ia kawin dan diketahui kecerdasannya”⁴⁹.

Sedangkan ulama yang tidak sependapat dengan Imam Malik dan Syafi’i ini di antaranya adalah Imam Hanafi, ia memandang bahwa ayah tidak sah menikahkan gadisnya yang dewasa tanpa persetujuannya. Beliau beralasan dengan hadits Nabi Saw :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتي تستأمر ولا البكر حتي تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال : انتسكت

Artinya : ”Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, tidak dinikahkan janda sehingga dimintai perintahnya dan tidak dinikahkan gadis sehingga diminta izinnnya, berkata para sahabat, wahai

⁴⁹Malik bin Anas, *loc. cit* , lihat juga karangan Muhammad bin Abdurrahman al-Baqi bin Yusuf az-Zarqani, *Syarhuz Zarqani ‘ala Muwaththa’ Imam Malik*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiyah, 2004), Juz 3, h. 166

Rasulullah, bagaimana izinnya? Jawab Rasul, izinnya adalah diamnya”⁵⁰.

Dalam memahami hadits ini, Imam Malik menggunakan *Mafhum Mukhalafah*, menurut penulis, *mafhum Mukhalafah* adalah suatu istilah yang luas sekali, karena mencakup *mafhum laqab*, *mafhum syarat*, *mafhum ‘adad*, *mafhum sifat*. Mengenai setiap jenis *mafhum* ini, para ahli Ushul tentang dapat atau tidaknya dijadikan hujjah untuk menerapkan suatu hukum dan ada pula sebagiannya yang masih diperselisihkan oleh mereka.

Mafhum mukhalafah yang terdapat dalam hadits di atas, jenisnya adalah *mafhum sifat*, yaitu menggantungkan hukum pada salah satu sifat zat, yang menjadi zat di sini adalah wanita dan sifatnya adalah gadis atau janda.

Jumhur ahli Ushul berpendapat bahwa *mafhum sifat* adalah hujjah, karena menggantungkan suatu hukum pada sesuatu zat, dengan menyebut salah satu sifatnya adalah berarti hukum itu tidak berlaku pada zat yang berlainan sifatnya. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hasan al-Asya’ri.⁵¹

Cara Imam Malik mengambil hukum dari hadits yang telah disebutkan di muka mungkin dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu. Dimana anak gadis pada masa itu tidak banyak keluar rumah dan tidak banyak bergaul, dengan keadaan

⁵⁰Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Bi syarhi Shaheh Bukhari*, (Beirut : Daarul Fikr, 2000), h.240

⁵¹Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *op.cit*, h. 321

seperti itu jelas tidak akan mampu mencari jodoh sebagai teman hidupnya. Oleh sebab itu, diperlukan campur tangan dari para wali, karena walilah yang lebih banyak bergaul di luar rumah sehingga dialah yang mengetahui mana laki-laki yang cocok untuk anaknya dan mana yang tidak.⁵²

Pada hakekatnya pendapat Imam Malik tersebut menekankan pentingnya wali untuk anak perempuan sehingga sebagai manifestasi dari tanggung jawabnya, orang tua dapat mencari jodoh bagi anaknya.

Setelah memperhatikan dalil-dalil yang digunakan, dan cara yang dipakai untuk mengambil dari suatu dalil, maka penulis berkesimpulan bahwa hak *ijbar wali* ini dapat diberlakukan terhadap gadis yang sudah dewasa yang belum dipandang cerdas, namun jika ia sudah cerdas, maka tidak berlaku baginya hak *ijbar wali*.

Namun, bagaimana dengan zaman sekarang, pergaulan antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi dimana saja, di kantor, di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya. Menurut penulis, pendapat Imam Malik tetap relevan pada saat sekarang ini, karena Imam Malik membatasi kepada gadis yang belum dipandang cerdas, namun perlu dijelaskan lagi kriteria cerdas tersebut. Menurut penulis ukuran cerdas tersebut untuk saat sekarang ini adalah dilihat tingkat pendidikan dan pergaulannya sehari-hari. Karena dengan demikian, perempuan tersebut bisa memilih jodoh yang serasi sebagai teman hidupnya, bahkan dia lebih

⁵²A. Hasan, *Soal Jawab Tentang Masalah Agama*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1980), cet, ke-8, h. 259

tau dari walinya. Sesungguhnya hukum bisa berubah dengan berubah zaman, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab berbunyi :

ان الاحكام تتغير بتغير الازمان⁵³

Terakhir dalam masalah janda yang belum dewasa, penulis berpendapat bahwa tidak ada *ijbar* terhadap janda yang belum dewasa, dengan alasan adalah hadits Ibnu Abbas di atas :

الثيب احق بنفسها من وليها

Artinya :”Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya”

Hadits di atas, di pertegas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa’i :

ليس للولي مع الثيب امر... (رواه ابو داود)

“Tidak ada perintah wali terhadap janda”⁵⁴.

Perkataan “الثيب” dalam hadits tersebut adalah umum, yang mencakup janda yang dewasa dan yang belum dewasa. Adapun janda yang belum dewasa ini, hendaklah ditunda pernikahannya sampai ia dewasa, kemudian barulah dimintai izin dan perintahnya.

⁵³T. M. Hasbi Ash Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang , 1993), h. 337

⁵⁴Imam Muhammad bin Ismail Amir Yamni Ash-Shan’ani, *op. cit*, h.231

Jika dipikir-pikir, manfaat mengawinkan anak-anak ini tidak ada sama sekali. Untuk mengurus dirinya saja belum mampu, apalagi mengurus suami yang sudah menjadi bagian kewajibannya sebagai isteri, (KHI pasal 15).

Tujuan dari pembatasan umur untuk perkawinan adalah :

1. Untuk menjaga kesehatan suami dan isteri
2. Untuk mengendalikan ledakan penduduk, yang pada saat-saat akhir ini sudah mendapat perhatian yang cukup dari semua pihak.
3. Untuk mermperkecil terjadinya kasus perceraian, karena biasanya manusia itu semakin dewasa semakin panjang pkirannya.

Penundaan pernikahan tersebut tidak berarti akan merugikannya, karena ia belum mempunyai kebutuhan disebabkan ia belum dewasa, melainkan akan membawa manfaat baginya, yaitu kesempatan untuk memilih calon suami yang sesuai dengan kehendaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam Skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Malik, di antara wali dalam perkawinan itu ada yang mempunyai hak *ijbar*, yaitu pemilik budak, ayah, dan orang yang menerima wasiat dari ayah, mereka berhak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izinnya. Imam Malik berpendapat hak *ijbar* tersebut diperoleh karena dua sebab, yaitu karena bimbang dan kecil. Jadi, yang boleh dinikahkan tersebut tanpa izin adalah, gadis yang kecil dan dewasa yang belum dipandang cerdas, kemudian janda yang kecil.
2. Imam Malik berpendapat demikian karena berpedoman dengan *Ijma' ahl al-Madinah*. Dari perbuatan Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah. Dalam kasus ini termasuk ke dalam *ijma' ahl Madinah yang naql*. Penulis sependapat dengan *Ijma' ahl Madinah yang naql* dijadikan hujjah karena secara logika Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi dan tempat makamnya, tempat turun wahyu, tempat kedudukan Islam, dan tempat berkumpul para sahabat. Karena itu kebenaran tidak akan menghindar dari para ahlinya. Warga Madinah juga menyaksikan sendiri ayat-ayat hukum dan merupakan orang yang paling tahu tentang keadaan Rasul dibandingkan dengan warga kota lain.

B. Saran-saran

Setelah skripsi ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak sebagai berikut :

1. Diharapkan seorang wali dalam menikahkan anak gadisnya terlebih dahulu memintai izinnya, walaupun seorang wali mempunyai hak *ijbar*.
2. Penulis mohon koreksi agar skripsi ini mencapai hasil maksimal dan memperoleh nilai yang sebaik-baiknya, agar berguna bagi semua pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khallaf, Abdul Wahab. 1990. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Jakarta : Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah
- Al-Bustani, Fuad Ifram. 1986. *Munjid al-Thulah*. Beirut : Dar al-Masyruq
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 2000. *Fathul Baari Bisyarh Shahih Bukhari, juz 10*. Beirut : Daarul Fikr
- Ash-Shan’ani, Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni. th. *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*. Beirut : Darul Kutubul Ilmiah
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1973. *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah*. Beirut : Assyariah
- Al-Qazwaini, Ali Abdillah ibn Yazid. th. *Sunan Ibn Majah*. Beirut : Dar al-Fikr
- Al-Syais, Muhammad Ali. 1970. *Nash al-Fiqh al-Ijtihadi wa Arwaruhu*. tt : Majmu’ al-Buhus al-Islamiyah
- Amin, Ahmad. 1974. *Dhuha Islam, juz II*. Kairao : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah
- Ash-Shiddiqiy, M.T. Hasbi. 1978. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta : Bulan Bintang
- Asy-Syubarsi, Ahmad. 1991. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta : Bumi Aksara
- Az-Zuhaili, Wahbah. th. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, juz VII*. Beirut : Dar Al-Fikr
- Dawud, Sulaiman Abi. th. *Sunan Abi Dawud, juz I*. Beirut : Dar Al-Fikr
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3*. Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Ensiklopedi Hukum Islam. 2000. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana
- Hosen, Ibrahim. 2003. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Firdaus
- Imam Bukhari. 1981. *Shahih Bukhari*. tt : Darul Fikr
- Khalil. Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyri Islami, terjemaham Nadirsyah Hawari*. Jakarta : Amzah
- Khudari, Muhammad. th. *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*. Singapura-Jeddah : al-Haramain

- Malik. 1989. *Al-Muwatha'*. Beirut : Darul Fikr
- _____. th. *Mudawwanah, jilid 2*. Beirut : Darul Kutubul ilmiah
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1992. *Fiqh Lima Mazhab, terjemahan Masykur. AB. Dkk*. Jakarta : Lentera
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang L CV. Toha Putra
- Rahman, Zulfan. 1995. *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Rusyd, Ibnu. 1989. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Amani
- Sabiq, Sayid. 2007. *Fiqh Sunnah Pengantar Imam Hasan Al-Banna, jilid 3*. Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, edisi I*. Jakarta : Modern English Press
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty
- Sulaiman, Al-Qadi Abi Walid. th. *Kitab Al-Muntaqa' Syarh Muwatha'*. Kairo : Darul Kitab Islam
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Taimiyag, Ibnu. 1988. *Ahkamuz zawaj*. Beirut : Darul Kutubul ilmiah
- Tihami, M. A. 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta : al-Kautsar
- Yango, Huzaiman Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Logos
- Yunus, Mahmud. 1993. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung
- _____. 1981. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Hidakarya Agung
- Zahrah, Muhammad Abu. 1952. *Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhi wa Fiqhuhu*. Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi

Zaid, Farouq Abd. 1986. *Hukum Islam Antara Tradisional adn Modern, terjemahan Husain Muhammad*. Jakarta : P3M